

Mencari Identitas Reformisme Islam: Konflik dan Integrasi Orang Arab-Hadrami di Pekalongan, 1905-1945

Muhammad Agung Saeputro,* Rabith Jihan Amaruli

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*agungsaeputro@gmail.com

Abstract

This article aims to present a new perspective on the internal conflict of Hadhrami-Arab in the colonial Indonesia. The main focus of this research is in Pekalongan, an important Hadhrami-Arab colony in the north coast of Java, with its network as centre of the movement. The discussion includes the Hadhrami-Arab integration in Pekalongan, through two main focuses, namely movement and schools. The internal conflict of identity in the Hadhrami-Arabs, which was triggered by unequal interpretations of Islamic reformism, has led to two main poles, namely Al-Irsyad Al-Islamiyah (the Irsyadis) on the one hand, and Rabithah Alawiyah (the alawis) on the other. Meanwhile, the Hadhrami-Arab integration can be distinguished through the Indonesian Arab Association (PAI), even though this organization is not a comprehensive integration forum. To a certain extent, PAI does not make the identities that appear in the Hadrami-Arab in Pekalongan disappear, while the institutional assimilation in modern schools can be better implemented by Al-Irsyad Al-Islamiyah and Rabithah Al-Alawiyah. By neglecting the dichotomy between reformism and conservatism, the two organizations have played key roles in their respective directions, from Islamic reformism to social-politic reformism.

Keywords: Islamic Reformism; Conflict; Integration; Hadhrami-Arab; Pekalongan.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengajukan sudut pandang baru atas konflik yang terjadi dalam internal Arab-Hadrami di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20. Fokus utama penelitian ini adalah Pekalongan, sebuah koloni Arab-Hadrami penting di pesisir utara Jawa, dengan jaringannya sebagai pusat-pusat pergerakan. Termasuk dalam pembahasannya adalah arah integrasi Arab-Hadrami di Pekalongan, melalui dua fokus utama, yaitu pergerakan dan sekolah. Konflik identitas dalam internal Arab-Hadrami yang dipicu ketidakseragaman dalam memaknai reformisme Islam, telah memunculkan dua kutub utama, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah (kaum *Irsyadi*) di satu sisi, dan Rabithah Alawiyah (kaum *alawi*) di sisi lain. Sementara itu, arah arah integrasi Arab-Hadrami dapat dilihat melalui Persatuan Arab Indonesia (PAI), meskipun organisasi ini bukanlah suatu wadah integrasi yang menyeluruh. Pada taraf tertentu, PAI tidak menjadikan identitas-identitas yang muncul dalam internal Arab-Hadrami seperti di Pekalongan menjadi hilang, sedangkan pembauran secara institusional dalam sekolah modern dengan lebih baik dapat dilaksanakan oleh Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Rabithah Al-Alawiyah. Dengan mengesampingkan dikotomi reformisme versus konservatisme, kedua organisasi tersebut telah memainkan peranan penting dalam arahnya masing-masing, dari reformisme Islam ke reformisme sosial-politik.

Kata Kunci: Reformisme Islam; Konflik; Integrasi; Arab-Hadrami; Pekalongan.

Pendahuluan

Diaspora orang Arab-Hadrami selalu mengacu pada hubungannya dengan Hadramaut. Bagi sebagian besar kelompok, mereka yang diyakini menjadi motor diaspora adalah para *Sadah* (sing. *Sayyid*) *Alawiyin* (Riddell, 2001, p. 115). Meskipun nantinya, Arab-Hadrami yang

datang ke berbagai wilayah di Nusantara termasuk berasal dari berbagai suku dan kalangan yang berbeda. Kedatangan mereka ke Nusantara biasanya meninggalkan jejak dalam catatan perjalanan dan beberapa jenis catatan tradisional lain (Ho, 2000, pp. 25-27).

Belum ada pendapat pasti kapan orang Arab-Hadrami pertama kali datang ke Kepulauan Nusantara. Ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Islamisasi dari Walisongo berhubungan pula dengan kalangan Arab-Hadrami (Alatas, 1999, pp. 334-335; Kathirithamby-Wells, 2009, p. 570; Al-Masyhur, 1994). Tujuan utama Arab-Hadrami melakukan diaspora ke Kepulauan Nusantara pada masa-masa awal adalah dakwah dan perdagangan. Pada abad ke-17 sampai ke-18, Arab-Hadrami turut memainkan peranan dalam politik dan menguatnya pembaharuan sufisme di Nusantara (Mohamad, 2013; Azra, 2013, pp. 210-317; Riddell, 2001, p. 220; Freitag & Smith, 1997, p. 220). Keberadaan Arab-Hadrami secara pasti diketahui sejak abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan Inggris melakukan pendataan. Keberadaan Arab-Hadrami juga dapat ditemukan dalam data catatan kolonial lain, sebagaimana pendapat Berg (van den Berg, 2010, p. 95).

Pergantian abad ke-20 menjadi masa yang paling menentukan bagi Arab-Hadrami. Gejala perubahan penting dan arah baru masyarakat terjadi. Kemunduran Islam secara umum ditambah kebijakan dan perlakuan pemerintah kolonial yang seringkali menyudutkan Islam dan orang-orang Arab, memunculkan reaksi dan turut menambah alasan atas kelahiran wacana kebangkitan Islam dan Reformisme Islam (Mandal, 1994, pp. 3-4). Menurut Mobini-Kesheh (2007), kebangkitan Arab-Hadrami dalam Reformisme Islam di Hindia-Belanda ditandai dengan pertumbuhan asosiasi atau perkumpulan sukarela, sekolah modern, dan terbitan berkala. Meskipun demikian, pada kenyataannya Reformisme Islam tidak berjalan secara seragam, perbedaan dan konflik identitas muncul dalam internal Arab-Hadrami di Hindia-Belanda (Mobini-Kesheh, 2007, p. 38). Peristiwa ini kemudian menyebar ke jaringan masyarakatnya, termasuk yang terpenting adalah di Pekalongan, sebuah koloni Arab-Hadrami penting di pantai utara Jawa.

Sejak awal abad ke-20 pula, Pekalongan telah ikut andil dalam pergerakan reformisme Islam. Untuk pertama kalinya salah satu sekolah modern yang pertama berdiri di Hindia-Belanda bernama Syamail Huda didirikan pada 1911 di Pekalongan. Beberapa tokoh pergerakan pusat Arab-Hadrami sempat menjadikan Pekalongan sebagai tempat untuk berkarir dan memberikan pengaruhnya. Secara lebih menyakinkan masyarakat Arab-Hadrami menganggap Pekalongan sebagai salah satu kota terpenting dengan mendirikan dua simpul jaringan, yakni Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan Rabithah Al-Alawiyyah. Pendirian dua cabang dari dua kutub utama dalam internal Arab-Hadrami tersebut di Pekalongan pada awal pergerakan, yaitu pada 1918 dan 1929, menandai pentingnya Pekalongan dalam dinamika internal Arab-Hadrami. Berdasar hal itu, artikel ini berfokus pada konflik dan integrasi Arab-Hadrami di Pekalongan pada 1905-1945. Konflik dan integrasi tersebut akan dilihat melalui dua wujud pergerakan Arab-Hadrami, yakni organisasi dan sekolah. Untuk mengeksplorasi lebih dalam, terdapat dua pertanyaan utama yang diajukan. Pertama, apa faktor yang menjadi latar belakang konflik dalam internal Arab-Hadrami di Pekalongan? Kedua, bagaimana arah integrasi yang berlangsung pada internal Arab-Hadrami di Pekalongan? Lalu, apa saja wujud dari integrasi tersebut? Usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi akar dan arah Reformasi Islam, khususnya dalam internal Arab-Hadrami di Pekalongan pada khususnya, dan di tempat lain pada umumnya.

Metode

Artikel ini disusun mengikuti empat tahap dalam metode sejarah, yang meliputi heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), interpretasi, dan penulisan (historiografi) (Gottschalk, 1983, p. 32; Notosusanto, 1984, pp. 22-23). Sumber-sumber yang digunakan

diperoleh dari berbagai lembaga, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Rabithah Alawiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Perpustakaan KITLV Jakarta, Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dan Perpustakaan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro serta beberapa koleksi pribadi. Untuk memaksimalkan temuan penelitian digunakan pula wawancara sejarah lisan (Vansina, 2014, pp. 19-50). Artikel ini menggunakan sumber-sumber primer berupa sumber terbitan lembaga yang relevan, seperti *statuten* dan *jubileum* (laporan kongres). Selain itu, manuskrip kitab dan terbitan surat kabar yang berkaitan dengan Arab-Hadrami yang beredar di Hindia-Belanda juga digunakan dalam artikel ini. Untuk mendapatkan konteks yang lebih utuh dan mendalam, dalam artikel ini juga digunakan sumber-sumber sekunder berupa buku, tesis, disertasi, dan artikel dari berbagai jurnal.

Konflik Identitas Arab-Hadrami di Pekalongan

Pada 1901 muncul inisiatif dari kalangan Arab-Hadrami di Hindia-Belanda untuk membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Jamiat Khair. Baru pada 17 Juni 1905 organisasi tersebut memperoleh pengesahan resmi dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, setelah Anggaran Dasar Jamiat Khair juga disetujui. Akan tetapi, organisasi ini dilarang mendirikan cabang-cabang di luar Batavia (Haikal, 1986, pp. 146-148; Saleh, 1996, p. 41).

Jamiat Khair merupakan organisasi Islam pertama yang didirikan oleh Arab-Hadrami yang mempunyai fokus utama dalam pendidikan dan isu-isu sosial. Lalu, jaringan murid Jamiat Khair mendirikan sekolah Samail Hoeda di Pekalongan pada 1911 M. Sekolah ini direalisasikan atas prakarsa suatu perkumpulan yang disebut Djama'ah Samail Hoeda (Mobini-Kesheh, 2007, p. 43; "Pemberian tahoe dari djama'ah Samail Hoeda Pekalongan," 1918). Tidak kalah maju dengan Batavia, Syamail Huda Pekalongan juga mendatangkan guru dari Timur Tengah, salah satunya Syaikh Ibrahim dari Mesir. Pada permasalahan sosial, jaringan Jamiat Khair telah berfungsi sebagai pendukung kuat Reformisme Islam dan perekat komunitas muslim. Selain kegiatan dukungan terhadap Pan-Islam, seperti halnya di Pekalongan, jaringan ini membentuk suatu penggalangan solidaritas bantuan untuk jamaah haji yang terkena musibah di tanah suci ("Comite penoeloeng hadji di Pekalongan," 1915).

Pada kuartal kedua abad ke-20, guru Jamiat Khair dari Sudan, yaitu Syaikh Ahmad Surkati mempunyai perbedaan pendapat dengan banyak kalangan di dalam organisasi. Surkati kemudian memberikan fatwa tentang *jaiz* atau bolehnya pernikahan antara golongan *syarifah* dengan kalangan *non-sayyid* (Badjerei, 1996, p. 29). Isu ini kemudian berkembang kepada berbagai pendapat dan propaganda yang saling menyerang dalam internal Arab-Hadrami. Syaikh Umar Yusuf Manggus lewat bantuan Saleh bin Ubaid Abdat dan Said Masy'abi akhirnya memberikan sebuah penawaran kepada Surkati untuk menempati rumah di Jalan Jatibaru No. 124. Ketegangan yang berlanjut membuat beberapa kalangan Arab-Hadrami tersebut berkeinginan untuk membentuk sebuah organisasi baru. Sebelum organisasi secara resmi berdiri, sekolah merupakan gerakan utama yang dibangun. Kemudian, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah didirikan pada 15 Syawwal 1332 atau bertepatan dengan 6 September 1914 ("Statuten van der vereeniging 'Djamyat Alislahwalersjat Al Arabia," 1915, p. 1; Badjerei, 1996, p. 33).

Konflik yang terjadi semakin menajam setelah orang-orang yang berafiliasi dengan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengidentifikasi diri dengan identitas baru sebagai *Irsyadi*. Persetujuan ini tidak hanya ditujukan pada Jamiat Khair. Alatas School sebagai sekolah modern menerima beberapa kali propaganda negatif dari Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Meskipun pendirinya seorang reformis bernama Abdullah bin Alwi al-Attas, turut menyumbangkan cukup banyak uang untuk pendirian Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebelumnya.

Hal tersebut tidak memberikan pengaruh untuk mengurangi gesekan di dalam internal Arab-Hadrami (Shahab, 2004, p. 5; "Al-Atas School," 1916, p. 79; "Al-Atas School," 1917, p. 88; Alatas, 2007, p. 92-95).

Baik pengaruh Pan-Islamisme dari Jamaluddin Al-Afghani maupun Reformisme Islam secara umum dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebenarnya lebih diterima baik oleh hampir seluruh kalangan Arab-Hadrami di Hindia-Belanda (Abushouk, 2007). Al-Irsyad lewat terbitan *Azzahiratoel Islamijah*, memandang konflik ini sebagai pertarungan kelompok *irsyadi* dan *sayyid (alawi)* ("Partij Alirsjad," 1342 H). Nampaknya, Al-Irsyad Al-Islamiyyah sejak awal pendiriannya menyimpan sentimen anti-*sayyid*. Hal ini seperti dibuktikan dalam *statuten* organisasi yang pertama pada pasal ke-lima, yang secara tersurat menyebut kalangan *sayyid (alawi)* tidak boleh menduduki jabatan apapun dalam kepengurusan organisasi ("Statuten van der vereeniging 'Djamyat Alislahwelersjat Al Arabia," 1915). Penolakan dari Al-Irsyad kepada kelompok *sayyid*, berkembang bukan hanya pada masalah *kafa'ah* (kesetaraan status *sayyid*) dalam pernikahan dan *taqbil* (tradisi cium tangan), tetapi juga perayaan Maulid Nabi. Hal itu membuktikan pendapat Riddell yang menyatakan bahwa konflik internal Arab-Hadrami itu juga telah dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ("Lidah jang tida bertoelang," 1938; Riddel, 2001, p. 115).

Konflik identitas dalam internal Arab-Hadrami turut mempengaruhi pergerakan di berbagai daerah. Salah satu yang terpenting adalah di Pekalongan. Dalam dunia pers yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Arab-Hadrami, Pekalongan merupakan kota yang turut memberi andil selain tentunya Batavia dan Surabaya sebagai produsen utama terbitan berkala Arab-Hadrami. Sebut saja beberapa contoh terbitan berkala yang dicetak di Pekalongan antara lain *Al-Syifa*, *Al-Irsyad* dan *Al-Madrasah* (Mobini-Kesheh, 1996).

Al-Irsyad Al-Islamiyyah mencapai momentum yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi Arab-Hadrami lainnya, melalui pendirian lima cabang pertamanya dari 1914 sampai 1919 dan terus berkembang ke berbagai daerah pada tahun-tahun setelahnya (Badjerei, 1996, pp. 77-79). Hal ini berkebalikan dengan nasib yang diterima oleh Jamiat Khair yang dilarang mendirikan cabang karena simpati terhadap gagasan Pan-Islam yang pada beberapa hal sangat anti-kolonial. Sesuai dengan "Stichtingsbrief der stichting school Djameat Geir" yang dikeluarkan pada 17 Oktober 1919, Jamiat Khair juga harus mengubah status organisasinya dari organisasi sosial menjadi hanya sebagai organisasi pendidikan (Saleh, 2016, pp. 51-52). Sementara itu, cabang Al-Irsyad Pekalongan berdiri sejak 1917 dan sekolah pertamanya resmi berdiri pada 1918. Ketua pertama Al-Irsyad Al-Islamiyyah cabang Pekalongan adalah Said bin Salmin Sahaq dengan ketua madrasah bernama Umar bin Sulaiman Naji. Pekalongan dianggap penting melalui pendirian cabang Al-Irsyad di masa-masa awal, selain tentunya beberapa orang penting pergerakan juga memulai karir di Pekalongan. Beberapa nama lain, selain yang telah disebut adalah Ustadz Muhammad Munif yang dikenal sebagai pencipta lambang Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan Ustadz Said Thalib merupakan salah satu tokoh yang dianggap cukup produktif menulis (Badjerei, 1996, pp. 44-77; Mobini-Kesheh, 1996, pp. 249-253; Abdullah Batarfie, Wawancara, 7 Desember 2017).

Merespons hal itu, kalangan *sayyid* mendirikan Rabithah Al-Alawiyyah yang tidak terlepas sebagai bentuk respon dari tekanan golongan *Irsyadi*. Atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, perkumpulan ini diakui dan mendapatkan status *rechtspersoon* pada 27 Desember 1928. Rabithah Al-Alawiyyah juga menganggap penting untuk mendirikan cabangnya di Pekalongan pada masa-masa awal pendiriannya beriringan dengan cabang Surabaya, Bondowoso, Solo, Gresik, dan Semarang ("Statuten van der vereeniging Arrabitatoel-Alawijah," 1928; Ahmad Muhammad Alatas, Wawancara, 27 November 2017). Kongres bagi seluruh kaum *sayyid (alawi)*, baik yang telah bergabung dalam organisasi Rabithah Al-Alawiyyah ataupun tidak pertama kali diadakan di Pekalongan. Kongres ini diadakan pada 8-11 Maret 1934 M atau 22-25 Dzulqaidah 1352 H. Salah satu tindak lanjut

terpenting pertemuan ini adalah konsolidasi sekolah-sekolah di bawah kaum *sayyid* yang kebanyakan dilaksanakan secara swadaya dan masing-masing memiliki nama yang berbeda. Menurut de Jonge, melalui pertemuan itu pula, konflik dengan Al-Irsyad bukanlah fokus yang harus dihadapi oleh kaum *sayyid* (de Jonge, 1993, p. 86).

Melalui keputusan penting tadi, kaum *sayyid* di Pekalongan selangkah jauh dalam keinginannya untuk berintegrasi. Rabithah Al-Alawiyah cabang Pekalongan kemudian mendirikan sekolah baru lagi bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang waktu itu dipimpin oleh H. As-Saqqaf pada 1930-an. Tidak lama kemudian, pada Desember 1931 pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengakomodasi model pendidikan Islam terutama bagi kalangan Arab-Hadrami dengan memberikan instruksi untuk mendirikan Hollandsch Arabische School (HAS) Pekalongan. Setelah pesan dari pemerintah tersebut disampaikan oleh Awad Syahbal, maka dibentuklah komite pendirian dengan Gasim Syihab sebagai kepala, A. A. Syihab sebagai sekretaris, dan dibantu oleh beberapa guru dari MAI. Tujuh tahun setelah pembentukan komite pendirian, HAS Pekalongan resmi berdiri pada 1938. Keterlambatan ini dikarenakan adanya tarik ulur pihak dari dalam MAI dan mereka yang berada di luar MAI. Sekolah ini dipimpin oleh Kepala Guru seorang lulusan Europeesche Lagere School (ELS) berdasar pada besluit dari Departement van Onderwijs en Eeredienst Batavia, Dd. 7 Oktober 1938, No. 28 ("Riwajat H. A. S. Pekalongan," 1939; "Roepa roepa dari Pekalongan," 1938; "Hollandsch Arabische School Pekalongan," 1938; "Sekeliling pendirian H.A.S. Pekalongan," 1939).

Terjadinya pertentangan di antara kelompok dalam internal Arab-Hadrami dikarenakan menajamnya identitas yang muncul. Kelompok dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang berdiri pada 1914 yang kemudian disebut kelompok *Irsyadi* bukan hanya menyerang status politik atau ekonomi dari kelompok *sayyid*, tetapi juga dipicu oleh ketidakseragaman memandang isu reformisme religius dalam wacana Reformisme Islam. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan kelompok *sayyid* sepenuhnya terhadap wacana reformisme sosial seperti Pan-Islamisme dan modernisme Islam. Selain itu, motif anti-*sayyid* menjadi dasar yang kuat dalam propaganda yang dilancarkan oleh kaum *Irsyadi*, sehingga membuat kelompok *sayyid* merasa perlu melakukan upaya resistensi dengan membentuk organisasi sosio-kultural Rabithah Al-Alawiyah pada 1928.

Arah Integrasi Arab-Hadrami di Pekalongan

Upaya rekonsiliasi konflik dan integrasi yang lebih luas sudah beberapa kali dilakukan. Sayangnya, inisiatif dari kalangan Arab-Hadrami *totok* membentuk Indo-Arabische Verbond (IAV) pada 1931 dan berbagai upaya lain tidak mampu bertahan lama (de Jonge, 1993, p. 82; Suratmin & Kwartanada, 2014, p. 71). Kelahiran Persatuan Arab Indonesia (PAI) pada 1934 justru menjadi alternatif yang paling berhasil. Pada 3 Oktober 1934 telah tercapai keputusan tentang susunan pengurus PAI. Terpilih Abdul Rahman Baswedan sebagai Ketua, Nuh Al-Kaf sebagai Sekretaris I, Salim Maskati sebagai Sekretaris II, Segaf As-Saqqaf sebagai Bendahara dan Abdurrahim Argubi sebagai Komisaris. Selain itu, diangkat pula 4 pengurus pembantu diantaranya Muhammad bin Abu Bakar Al-Attas (Batavia), A.R. Al-Aydrus (Batavia), Hasan Al-Jilani (Pekalongan), Ahmad Bahaswan (Solo) dan Muhdhor Al-Aydrus (Salatiga). Karena beberapa alasan, Pekalongan terpilih menjadi tempat pelaksanaan kongres PAI yang pertama setelah pembentukan (Conferentie peranakan Arab Indonesia, 1934).

Segera setelah pembentukan, PAI mendapatkan simpati yang baik dalam jaringan masyarakat Arab-Hadrami. Setidaknya dalam waktu dua tahun setelah Kongres 1935, PAI baru dapat dikatakan cukup mapan. Terbukti sebelum 1937, PAI lebih fokus dalam pendirian cabang-cabangnya terutama di Jawa. Baru pada Januari 1937, PAI mampu benar-benar melakukan pergerakan yang rapi, dibuktikan dengan menerbitkan majalahnya sendiri.

Majalah ini berisi informasi mengenai arah pergerakan dan seluk beluk informasi organisasi pusat PAI dan cabang-cabangnya. Dimulai dengan terbitnya majalah *Sadar* kemudian *Insaf* pada 1937. PAI juga mempunyai saluran lain, yaitu *Aliran Baroe* yang terbit sejak 1938 dan majalah *Berita* sejak 1940. Adapun terbitan lain yang berafiliasi dengan PAI dan sebelumnya merupakan media afiliasi organisasi IAV, yaitu *Pewartar Arab* ("Tidak perloe kaja tetapi bersatoe tentoe menang," 1934; Mobini-Kesheh, 1996, pp. 243-254).

Meskipun mungkin banyak cabang PAI berdiri beriringan dengan pembentukan organisasi pusat, tetapi berita tentang pergerakannya baru dapat diketahui sejak 1937. Cabang PAI secara umum, khususnya Pekalongan terbukti mulai berjalan rapi sejak 1937. Selain tindak lanjut permintaan keanggotaan baru dan upaya memperluas gagasan PAI, dalam tahun itu terjadi pergantian pengurus cabang PAI Pekalongan. Diketahui dalam rapat anggota 16-17 Juli 1937, terpilih sejumlah nama pengurus. Hasan A. Al-Jilani terpilih sebagai ketua, Ali bin Muhammad Al-Attas sebagai pemuka muda, A. Bahraq sebagai sekretaris I, Salim Ali Sungkar sebagai penulis II dan Ali Argubi sebagai bendahara. Adapula jabatan bagian pengawas yang diberikan kepada A. O. Sungkar, Talib al-Uwaini, Alwi Syihab, dan Zein bin Yahya ("Berita perserikatan," 1937, p. 106).

Sejak 1937, kemajuan-kemajuan signifikan baru terlihat dalam tubuh PAI. Pada akhir tahun 1937, cabang PAI Pekalongan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan pada 1 November 1937. Gedung tersebut terletak di Kadjaksanaanstraat. Berbagai pertemuan pusat dan cabang juga rutin diselenggarakan, sementara itu, Badan Pemuda PAI Pekalongan dibentuk pada 1938 ("Berita perserikatan," 1937; "Merajakan peringatan hari kesadaran peranakan Arab Indonesia," 1937; "Congres bahasa Indonesia," 1938; "Berita perserikatan," 1938).

Peran penting Pekalongan juga terlihat dalam Kongres wanita PAI pertama dilangsungkan di Pekalongan pada 1940 dan dipimpin oleh Ibu A.R. Baswedan dan Ibu Anwar Makarim. Kongres ini banyak membicarakan tentang perlunya para wanita Arab-Hadrami lebih terbuka dalam pergaulan hidup di masyarakat. Wanita PAI juga turut berpartisipasi dalam asosiasi wanita nasionalis seperti Kongres Perempuan Indonesia ("Taman kepoetrian," 1939, p. 16; "Hidoep pergerakan kaoem ibu," 1939; "Pergerakan kaum isteri Arab," 1939, pp. 32-34; Vuldy, 1985, p. 117). Pada 1939, PAI juga turut mendukung Petisi Soetardjo, ketika bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia (Gapi) yang semakin meneguhkan dukungannya terhadap cita-cita persatuan nasional. Setelah Jepang menduduki Hindia-Belanda sejak 1942, para anggota PAI banyak melebur ke berbagai perkumpulan (Suratmin & Kwartananda, 2014, xii).

Pada 1942, M. Abdullah Hinduan, yang juga mantan guru sekolah Syamail Huda kembali dari perjalanan studinya ke Mesir menuju Pekalongan. Ia mengusulkan membuka sekolah untuk semua kalangan masyarakat muslim (Vuldy, 1985, p. 116). Bersama beberapa tokoh PAI, seperti Hasan Al-Jilani, mereka mendirikan sekolah Ma'had Islam. Operasional sekolahan ini ditunjang oleh suatu badan wakaf. Izin tersebut keluar dalam Akte Notaris No. 5 tanggal 28 Januari 1944 (Akta ini kemudian diperbaharui dengan Akte Notaris No. 15 tanggal 28 Desember 1959). Pengurus pertama Badan Wakaf Ma'had Islam terdiri dari Hasan A. Al-Jilani sebagai ketua, Abdullah Hinduan sebagai penulis dan Muhammad Baragbah sebagai bendahara ("Riwayat perguruan ma'had Islam Pekalongan," 2013, p. 8; Ilyas, 2018).

Setelah pendirian Ma'had Islam, beberapa sekolah kaum *Alawi* dan beberapa sekolah Islam lain di Pekalongan turut menggabungkan diri. Salah satunya adalah madrasah *salafiyah* atau MAI yang sebelumnya pembangunan tambahan gedungnya diprakarsai oleh Husein bin Abdullah Syihab pada 1940 M. Ia merupakan salah satu aktivis dan dermawan, yang juga ikut menyumbangkan dana untuk pendirian madrasah dan amal lain. Ma'had Islam sejak awal telah dibuka juga untuk masyarakat muslim pada umumnya, termasuk orang Jawa, India (Koja) dan lain-lain. Penyerahan urusan sekolah juga dilakukan oleh Madrasah

Ma'rifatuddin yang berdiri sejak 1926 M. Penyerahan yang dilakukan pada 1944 M hanya meliputi pengelolaan, sedangkan aset gedung dan lainnya tetap dimiliki oleh Badan Wakaf Ma'rifatuddin, Krapyak Pekalongan (Zaki bin Abdillah Al-Habsyi, Wawancara, 4 Februari 2018; "Riwayat perguruan ma'had Islam Pekalongan," 2013, p. 9).

Kecurigaan yang cukup lama terhadap masyarakat Arab termasuk di dalamnya Arab-Hadrami oleh pemerintah Jepang mulai melunak pada akhir masa pendudukan. Melihat tekanan dari kalangan Islam mungkin akan menjadi besar, konsesi yang lebih besar dan secara tegas diberikan oleh pemerintah militer Jepang pada Juli 1944, dengan memberikan kepada orang Arab-Hadrami status yang sama dengan orang Indonesia. Pengaturan ini mengecualikan mereka dari keharusan untuk melakukan kewajiban mendaftar dan membayar ongkos pendaftaran khusus yang diberlakukan kepada orang-orang "asing" di Jawa pada umumnya. Ada di antara kalangan Arab-Hadrami yang pro maupun kontra dengan Jepang. Bersama golongan pribumi dan etnis Tionghoa, beberapa pemuda-pemuda Arab-Hadrami di Pekalongan dan sekitarnya diketahui bergabung ke dalam satuan semi-militer seperti Barisan Jibaku, Barisan Kamikaze, dan Barisan Berani Mati (Benda & Alfian, 1980, p. 160; de Jonge, 2011, pp. 349-350).

Dalam dunia pendidikan, di satu sisi, sekolah di bawah Rabithah Al-Alawiyah telah dibubarkan. Sementara di sisi lain, sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah dibuka kembali setelah masa pendudukan Jepang usai. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, para individu dalam PAI sepakat untuk tidak mengaktifkan lagi organisasi PAI yang telah dibubarkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Hal ini sesuai dengan itikad bersama seluruh anggota PAI sebagaimana pidato yang disampaikan oleh AR. Baswedan dalam rapat umum PAI pada 1937 di Semarang. Semua individu yang terlibat dalam PAI dianjurkan untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya kepada semua partai politik yang sudah ada, meskipun tidak semua individu sepakat dengan hal ini dalam praktiknya. Terlepas dari perbedaan pilihan, orang Arab-Hadrami merasa lebih dekat dan lebih dapat diterima menjadi warga Indonesia karena sebagian kesamaan agama Islam dengan mayoritas penduduk (Suratmin dan Kwartanada, 2014, p. 113; Hayaze, 2015, p. 41; de Jonge, 2011, p. 351; de Jonge; 1993, 73).

Di satu sisi, Al-Irsyad Al-Islamiyah sebagai organisasi sosial dan berbagai badan di bawahnya termasuk lembaga pendidikannya tetap mempertahankan bentuknya sampai masa-masa setelah kemerdekaan. Pada sisi lain organisasi Rabithah Al-Alawiyah secara organisasi masih eksis, tetapi lembaga pendidikannya sejak 1942 telah membubarkan diri. Beberapa aktivis Rabithah bersama aktivis Khoja dan lembaga pendidikan Islam dari golongan Jawa membentuk organisasi pendidikan Islam baru bernama Ma'had Islam sejak 1942.

Simpulan

Wacana Reformisme Islam di kalangan Arab-Hadrami di Hindia Belanda pada abad ke-19, dengan segera berpengaruh ke berbagai wilayah. Wacana tersebut, secara garis besar terdiri dari dua wacana utama, yaitu reformisme religius dan reformisme sosial-politik. Peristiwa ini telah menimbulkan respon yang tidak sepenuhnya seragam, yakni munculnya dua kutub yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah (kaum *Irsyadi*) di kutub yang satu, dan Rabithah Al-Alawiyah (kaum *Alawi*) di kutub yang lain. Pengaruh dari wacana yang muncul disertai pergerakan organisasi masing-masing kutub tersebut, telah memunculkan konflik dan menyebar ke berbagai wilayah di Hindia-Belanda termasuk Pekalongan.

Sebagai kota pesisir dengan populasi Arab-Hadrami yang patut diperhitungkan, Pekalongan mempunyai peran yang cukup penting jika dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah. Selain karena populasinya, beberapa tokoh pergerakan dan peran pergerakan

Pekalongan menjadikannya sebagai salah satu simpul yang diperhitungkan dalam jaringan masyarakat Arab-Hadrami. Sementara itu, arah integrasi Arab-Hadrami di Pekalongan juga menunjukkan fakta penting. Meskipun dianggap sebagai organisasi yang berhasil menyatukan Arab-Hadrami, tetapi PAI bukanlah sebuah bentuk fusi atau federasi dari organisasi-organisasi yang sudah ada. Begitupun dengan ketegangan yang terjadi dalam internal Arab-Hadrami tidak secara otomatis sepenuhnya hilang. Namun, PAI dalam porsi tertentu layak mendapatkan apresiasi karena berhasil meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Keberhasilan tersebut juga dipicu oleh cita-cita baru untuk memperjuangkan nilai nasionalisme di kalangan Arab-Hadrami di Hindia-Belanda.

Referensi

- Abushouk, A. I. (2007). Al-Manar and the Hadhrami elite in the Malay-Indonesian world: Challenge and response. *Journal of the Royal Asiatic Society* 17(3), 301-322. <https://www.jstor.org/stable/25188735>
- Al-Atas School: Soerat terboeka kepada toean Consul-Generaal Turkye. (30 Desember 1916). *Pertimbangan*.
- Al-Atas School. (15 Februari 1917). *Pertimbangan*.
- Al-Masyhur, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain (1984). *Syamsu Al-Dhahirah: Fi Nasab Ahl Bait min Bani 'Alawiy Furu' Fatimah al-Zahra wa Amiir al-Mukminin 'Ali Radhiyallahu Anhu*. Jeddah: Aalim al-Ma'rifat.
- Alatas, Alwi Hasan (2007). *Islamic reformism in the Netherland East Indie: The role and thought of 'Abd Allah ibn 'Alawi ibn 'Abd Allah al-'Attas (1844-1929)* (Tesis, International Islamic University Malaysia, Gombak, Selangor, Malaysia). Diakses dari <http://210.48.222.250/handle/123456789/6607>
- Alatas, S. F. (1999). The Tariqat Al-'Alawiyyah and the Emergence of the Shi'i school in Indonesia and Malaysia. *Oriente Moderno* 79(2). <https://doi.org/10.1080/13639810120074753>
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badjerei, H. (1996). *Al-Irsyad mengisi sejarah bangsa*. Jakarta: Presto Prima Utama.
- Benda, H. J., & Alfian (1980). *Bulan sabit dan matahari terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Pustaka Jaya.
- Berita perserikatan. (Desember 1937). *Insaf*.
- Berita perserikatan. (Juli 1937). *Insaf*.
- Berita perserikatan. (Maret 1938). *Insaf*.
- Comité penoeloeng hadji di Pekalongan. (24 Agustus 1915). *Oetoesan Hindia*.
- Conferentie peranakan Arab Indonesia. (7 Oktober 1934). *Pewartara Arab*.
- Congres bahasa Indonesia. (Juni 1938). *Insaf*.
- de Jonge, H. (1993). Discord and solidarity among the Arabs in the Netherlands East Indies 1900-1942. *Indonesia*, (55), 73-90. <https://doi.org/10.2307/3351087>.
- de Jonge, H. (2011). Selective accommodation: the Hadhramis in Indonesia during World War II and the struggle for independence. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 31(2), 343-354. <https://doi.org/10.1215/1089201X-1264280>
- Freitag, U. & Clarence-Smith, W. 1997). *Hadhrami traders, scholars, and statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s*. Leiden-New York-Koln: Brill.
- Gottschalk, Louis (1983). *Mengerti sejarah*, (Nugroho Notosusanto, Trans). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Haikal, H. (1986). *Indonesia-Arab dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia (1900-1942)* (Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

- Hayaze, N. A. K. (2015). *AR. Baswedan: revolusi batin sang perintis*. Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI).
- Hidoep pergerakan kaoem iiboe Arab Indonesia di Pekalongan. (Januari 1939). *Insaf*.
- Ho, Engseong (2000). *Genealogical figures in an Arabian Indian diaspora* (Disertasi, University of Chicago, Chicago, United States).
- Hollandsch Arabische School Pekalongan. (Desember 1938). *Insaf*.
- Kathirithamby-Wells, J. (2009). 'Strangers' and 'stranger-kings': The *sayyid* in eighteenth-century maritime Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 567-591. doi:10.1017/S0022463409990075
- Lidah jang tida bertoelang....!; Adakah P.A.I. mendapat special hukum didalem Islam? (1938). *Aliran Baroe*.
- Mandal, S. K. (1994). *Finding their places: A history of Arabs in Java under Dutch rule, 1800-1924* (Disertasi, Columbia University, Columbia, United States).
- Merajakan peringetan hari kesadaran peranakan Arab Indonesia. (Oktober 1937). *Insaf*.
- Mobini-Kesheh, N. (1996). The Arab periodicals of the Netherlands East Indies, 1914-1942. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 152(2), 236-256. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003012>.
- Mobini-Kesheh, N. (2007). *Hadrami awakening: kebangkitan Hadhrami di Indonesia*. Jakarta: Akbar.
- Mohamad, Muzaffar Dato' Hj (2010). *Ahlul-Bait (family) of Rasulullah SAW and the Malay Sultanates*. Selangor: Crescent.
- Notosusanto, N. (1984). *Hakekat sejarah dan metode sejarah*. Jakarta: Mega Book Store.
- Partij Alirjad dan Partij Sajjid di Djawa. (2 Shafar 1342 H). *Azzachiratoel Islamijah*.
- Pemberian tahoe dari djama'ah Samail Hoeda Pekalongan. (5 Agustus 1918). *Oetoesan Islam*.
- Pergerakan kaoem isteri Arab. (Februari 1939). *Insaf*.
- Riddell, P. G. (2001). Arab migrants and Islamisation in the Malay World During the Colonial Period. *Indonesia and the Malay World*, 29 (84), 113-128. <https://doi.org/10.1080/13639810120074753>
- Riwayat H. A. S. Pekalongan. (Januari 1939). *Aliran Baroe*.
- Riwayat perguruan ma'had Islam Pekalongan. (November 2013). *Ma'haduna*.
- Roepa roepa dari Pekalongan: Hollandsche Arabische School diboeka! (Agustus 1938). *Aliran Baroe*.
- Saleh, W. F. (1996). *Jam'iyat Khair: gerakan modern Islam di Indonesia dari perkumpulan sosial menjadi yayasan pendidikan 1905-1919* (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).
- Sekeliling pendirian H.A.S. Pekalongan: riwayat jang tida sewadjarnja. (Maret 1939). *Aliran Baroe*.
- Shahab, A. (2004). *Saudagar Baghdad dari Betawi*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Statuten van der vereeniging 'Djamyat Alislahwalersjat Al Arabia, 1915.
- Stichtingsbrief der stichting school Djameat Geir, 17 Oktober 1919.
- Statuten van der vereeniging 'Arrabitatoel-Alawiyah Al Arabia, 1928.
- Suratmin & Kwartanada, D. (2014). *Biografi A.R. Baswedan: membangun bangsa, merajut Keindonesiaan*. Penerbit Buku Kompas.
- Taman kepoetrian. (Januari 1939). *Insaf*.
- Tidak perloe kaja tetapi bersatoe tentoe menang. (25 Juli 1934). *Pewartara Arab*.
- van den Berg, L. W. C. (2010). *Orang Arab di Nusantara*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Vansina, Jan. *Tradisi lisan sebagai sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Vuldy, C. (1985). La communauté Arabe de Pekalongan. *Archipel*, 30(1), 95-119.